



Analisis Strategi Pemerataan Infrastruktur Wilayah Berbasis Spasial untuk Mengurangi Kesenjangan Antarwilayah di Kabupaten Cianjur

Nadifa Hanun Fatimah^{1*}, Ayu Andira¹, Nazahah Noer Azizah¹, Sarah Fadillah¹,
Zaneta Alya Salsabila¹

¹Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur, Indonesia

ABSTRACT

Infrastructure inequality remains a major challenge in regional development in Cianjur Regency. Infrastructure is unevenly distributed, with the northern and central regions developing more rapidly than the southern region, which still faces limited access to roads, clean water, education, health services, and telecommunications. These disparities are influenced by mountainous and hilly topographic conditions that affect accessibility and infrastructure development. This study aims to analyze spatial patterns of infrastructure inequality and identify areas with the lowest levels of infrastructure services. The research employs a descriptive qualitative approach based on Geographic Information Systems (GIS) using secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Cianjur Regency. The analyzed variables include road networks, educational facilities, health services, clean water infrastructure, electricity, and telecommunications. Infrastructure equity was assessed through facility-to-population ratios and spatial overlay analysis. The results indicate that infrastructure remains concentrated in the northern and central regions, which have better accessibility. Of the total district road network of 1.355.22 km, approximately 332.76 km (24.9%) are in damaged or severely damaged condition, with a road availability ratio of only 0.51 km per 1,000 inhabitants. Telecommunications tower construction also declined from 14 units in 2023 to 4 units in 2024. Infrastructure inequality is influenced by topography, population density, accessibility, and the concentration of economic activities.

ABSTRAK

Ketimpangan distribusi infrastruktur masih menjadi permasalahan pembangunan wilayah di Kabupaten Cianjur. Infrastruktur belum tersebar merata, di mana wilayah utara dan tengah berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah selatan yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap jalan, air bersih, pendidikan, kesehatan, dan telekomunikasi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik topografi yang didominasi pegunungan dan perbukitan sehingga memengaruhi aksesibilitas serta pembangunan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola ketimpangan infrastruktur antarwilayah dan mengidentifikasi wilayah dengan tingkat pelayanan infrastruktur terendah. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) menggunakan data sekunder dari BPS dan Bappeda Kabupaten Cianjur. Data yang dianalisis meliputi jaringan jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, dan telekomunikasi. Analisis dilakukan melalui perhitungan rasio ketersediaan fasilitas terhadap jumlah penduduk dan teknik *overlay* spasial untuk mengelompokkan tingkat pemerataan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur masih terkonsentrasi di wilayah utara dan tengah yang memiliki aksesibilitas lebih baik. Dari total panjang jalan kabupaten sebesar 1.355,22 km, sekitar 332,76 km (24,9%) berada dalam kondisi rusak dan rusak berat dengan rasio ketersediaan jalan hanya 0,51 km per 1.000 penduduk. Selain itu, pembangunan menara telekomunikasi menurun dari 14 unit pada tahun 2023 menjadi 4 unit pada tahun 2024. Temuan ini menunjukkan bahwa ketimpangan infrastruktur dipengaruhi oleh topografi, kepadatan penduduk, aksesibilitas, dan konsentrasi aktivitas ekonomi.

KONTAK

nadifa.hanun.fatimah@mhs.unj.ac.id

KATA KUNCI

Ketimpangan Infrastruktur,
Pembangunan Wilayah,
Pemerataan Pembangunan.

Received: 28/02/2026

Revised: 23/05/2026

Accepted: 24/05/2026

Online: 31/05/2026

Published: 31/05/2026



Risenologi is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International Public Licence](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) (CC-BY 4.0)

PENDAHULUAN

Pemerataan pembangunan merupakan isu penting dalam perencanaan wilayah karena berkaitan langsung dengan keadilan akses masyarakat terhadap sumber daya dan pelayanan dasar. Pemerataan pembangunan tidak menyiratkan pembangunan yang sama di semua daerah, melainkan pemanfaatan potensi masing-masing wilayah sesuai karakteristik dan potensi yang dimiliki sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata (Herath, 2017). Dalam beberapa dekade terakhir, pendekatan pembangunan yang menekankan aspek pertumbuhan ekonomi semata dinilai belum mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Sejalan dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ke-10 tentang pengurangan ketimpangan dan tujuan ke-11 tentang kota dan permukiman yang berkelanjutan, prinsip pemerataan kembali ditekankan sebagai landasan pembangunan berkelanjutan guna menekan disparitas sosial dan spasial. Namun, ketimpangan pembangunan masih menjadi tantangan di Indonesia. Perbedaan tingkat perkembangan antarwilayah umumnya dipengaruhi oleh variasi aksesibilitas, konsentrasi kegiatan ekonomi, serta ketersediaan infrastruktur yang tidak merata (Sjafrizal, 2018). Hal ini juga terlihat dari posisi Indonesia dalam Inclusive Development Index tahun 2018 yang masih berada di bawah beberapa negara Asia Tenggara lainnya (World Economic Forum, 2018).

Permasalahan ketimpangan pembangunan juga terlihat di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 3.840 km² dengan jumlah penduduk lebih dari 2,6 juta jiwa pada tahun 2025 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur, 2025). Pembangunan wilayah merupakan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan potensi lokal serta pemerataan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan publik (UN-Habitat, 2022). Infrastruktur dan aksesibilitas merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan suatu wilayah karena menentukan kelancaran mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta keterhubungan antarwilayah (Tarigan, 2019). Namun, dalam praktiknya, kebijakan pembangunan wilayah yang berorientasi pada pemerataan, baik dalam RTRW 2011–2031 maupun RPJMD 2021–2026 pada implementasinya sering kali mengalami penyimpangan sehingga upaya pemerataan terkesan stagnan.

Secara geografis, Cianjur memiliki karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari kawasan pegunungan di bagian utara hingga wilayah pesisir di bagian selatan. Kondisi fisiografis tersebut memengaruhi pola persebaran penduduk, aksesibilitas, serta pembangunan infrastruktur antarwilayah. Pembangunan cenderung terkonsentrasi di wilayah utara dan pusat pertumbuhan, sedangkan wilayah selatan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap jalan, listrik, air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Kondisi infrastruktur dasar, khususnya jalan dan jembatan, masih menjadi isu utama pembangunan daerah. Infrastruktur jalan merupakan komponen penting dalam mendukung konektivitas wilayah, distribusi barang dan jasa, serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketersediaan dan kualitas jalan yang baik dapat memperlancar aksesibilitas dan mendorong perkembangan wilayah, terutama pada daerah perdesaan dan kawasan yang relatif terisolasi (Tarigan, 2019; Kamaludin & Qibthiyah, 2022). Meskipun tingkat kemandirian jalan di Kabupaten Cianjur telah mencapai sekitar 65%, distribusi kualitas infrastruktur belum merata, terutama pada wilayah perdesaan dan kawasan pinggiran. Bahkan, dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 1.355,22 km, sekitar 24,9% atau setara 332,76 km masih berada dalam kondisi rusak dan rusak berat (Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur, 2024).

Pemerintah daerah telah menginisiasi berbagai program peningkatan konektivitas antarwilayah. Namun, keluhan masyarakat terkait aksesibilitas dan kualitas layanan publik masih sering dijumpai. Keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, dan air bersih masih banyak ditemukan di wilayah selatan dan kawasan perdesaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur masih terkonsentrasi pada wilayah dengan aksesibilitas dan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi.

Berbagai dokumen perencanaan daerah, seperti RTRW Kabupaten Cianjur 2011–2031 dan RPJMD 2021–2026, telah menempatkan pemerataan pembangunan sebagai salah satu prioritas kebijakan. Namun, implementasinya belum sepenuhnya mampu mengurangi ketimpangan antarwilayah. Hal ini tercermin dari posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur yang masih berada pada peringkat terendah di antara 27 kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2024 meskipun nilainya meningkat dari 65,38 pada tahun 2018 menjadi 68,89 pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan wilayah di Kabupaten Cianjur masih menghadapi tantangan dalam pemerataan pelayanan dan kualitas infrastruktur.

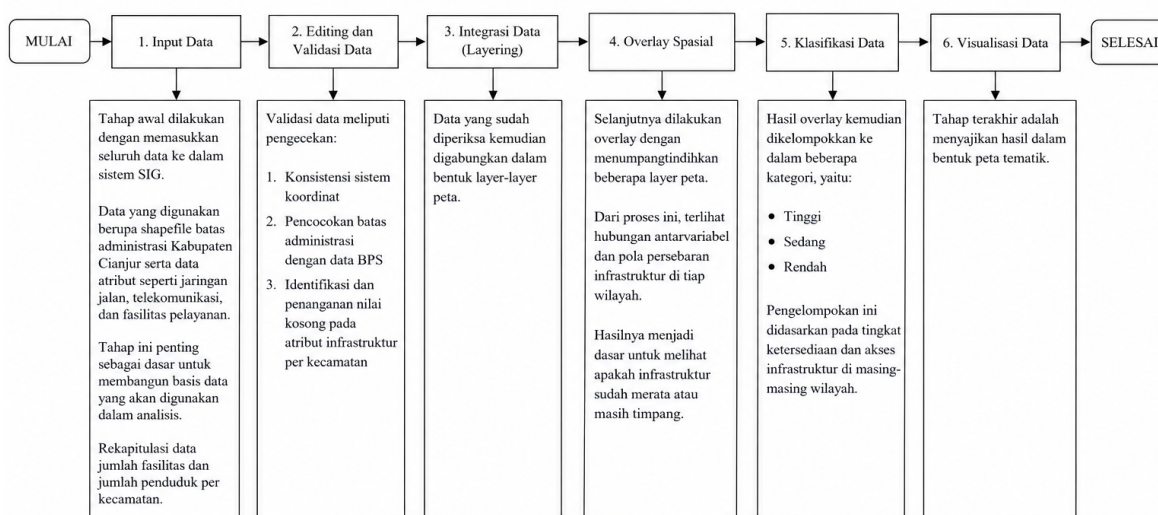
Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas dinamika penggunaan lahan di Kabupaten Cianjur, seperti Panjaitan *et al.*, (2019) yang menyoroti kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW serta Astuty *et al.*, (2023) yang menunjukkan peningkatan lahan terbangun dan perubahan tutupan lahan pada periode 2013–2022.

Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Satuan
Kependudukan	Jumlah penduduk	Unit
Kependudukan	Rasio penduduk	Unit
Infrastruktur Sosial	Jumlah fasilitas sekolah	Unit
Infrastruktur Sosial	Jumlah fasilitas kesehatan	Unit
Infrastruktur Dasar	Persentase akses air bersih	%
Infrastruktur Dasar	Pemakaian energi listrik	kWh
Infrastruktur Dasar	Panjang jalan mantap	Km
Infrastruktur Penunjang	Jumlah menara telekomunikasi	Unit

Tahapan Analisis Data

Diagram alir penelitian berikut menunjukkan tahapan penelitian yang dilakukan dalam analisis pemerataan infrastruktur wilayah berbasis spasial di Kabupaten Cianjur. Tahapan penelitian dimulai dari input dan validasi data, kemudian dilanjutkan dengan proses *overlay* spasial, klasifikasi data, hingga visualisasi hasil dalam bentuk peta tematik.



Gambar 2. Diagram Alir Penelitian

Sumber: Tim Penulis, 2025

Nilai indeks pemerataan infrastruktur diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi menggunakan metode interval kelas. Penentuan interval dilakukan berdasarkan rentang nilai maksimum dan minimum indeks yang diperoleh dari hasil *overlay* seluruh indikator infrastruktur.

Tabel 2. Klasifikasi Tingkat Pemerataan Infrastruktur

No	Kategori	Satuan
1	Tinggi	Nilai rasio ketersediaan infrastruktur berada di atas rata-rata keseluruhan wilayah
2	Sedang	Nilai rasio ketersediaan infrastruktur berada di sekitar rata-rata wilayah
3	Rendah	Nilai rasio ketersediaan infrastruktur berada di bawah rata-rata keseluruhan wilayah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang terletak pada koordinat 6°21'–7°25' Lintang Selatan dan 106°42'–107°33' Bujur Timur dengan luas sekitar 361.434,98 hektare yang terbagi ke dalam 32 kecamatan, 354 desa, dan 6 kelurahan. Secara administratif, wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Purwakarta di utara, Kabupaten Bandung dan Garut di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Sukabumi di barat. Kondisi geografis dan aktivitas ekonomi memengaruhi persebaran penduduk di Kabupaten Cianjur (Nurwati & Mulyana, 2017). Secara topografis, wilayah Cianjur terbagi menjadi tiga zona utama, yaitu Cianjur Utara yang didominasi pegunungan dan kawasan wisata, Cianjur Tengah berupa perbukitan dengan lahan pertanian dan perkebunan, serta Cianjur Selatan yang berupa dataran rendah dengan potensi pertanian dan perikanan (Indrianeu *et al.*, 2021). Rentang ketinggian wilayah bervariasi antara 6 meter hingga lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut dengan Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebagai titik tertinggi.

1. Kependudukan

Jumlah penduduk menjadi salah satu faktor penting dalam analisis ketimpangan infrastruktur karena berpengaruh terhadap kebutuhan dan tingkat pelayanan fasilitas dasar di setiap wilayah. Perbedaan jumlah penduduk antar kecamatan dapat memengaruhi distribusi pembangunan, terutama pada penyediaan jaringan jalan, pendidikan, kesehatan, serta layanan publik lainnya. Adapun rincian jumlah penduduk setiap kecamatan di Kabupaten Cianjur disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Cianjur

Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2021-2025 (%)
Agrabinta	37.003	40.879	41.323	39.861	41.972	0,77
Leles	29.231	31.621	31.730	32.150	31.522	0,02
Sindangbarang	55.009	59.129	59.912	59.560	61.282	1,02
Cidaun	60.967	70.002	70.642	69.114	71.384	0,59
Naringgul	43.863	47.690	48.036	47.065	48.268	0,39
Cibinong	59.038	64.729	65.469	64.566	66.608	0,83
Cikadu	34.802	37.219	37.508	37.617	37.748	0,44
Tanggeung	48.198	50.709	51.393	51.727	52.604	1,05
Pasirkuda	33.670	38.472	38.989	35.939	39.534	0,79
Kadupandak	50.313	53.296	53.792	53.960	54.385	0,61
Cijati	32.203	34.579	34.796	35.929	34.864	0,28
Takokak	49.064	52.122	52.308	54.573	51.987	0,01
Sukanagara	54.682	56.387	57.201	57.408	58.714	1,15
Pagelaran	72.565	76.345	77.227	78.343	78.601	0,84
Campaka	67.286	70.235	70.930	71.311	71.837	0,67
Campakamulya	22.842	24.015	24.073	23.690	23.841	0,13
Cibeber	128.467	135.484	137.561	138.117	141.577	1,25
Warungkondang	75.649	79.022	80.525	82.411	83.783	1,64
Gekbrong	58.120	61.894	63.048	62.859	65.528	1,6
Cilaku	112.232	119.746	122.188	121.056	127.648	1,78
Sukaluyu	86.404	91.570	93.892	93.999	99.524	2,31
Bojongpicung	81.903	84.658	86.111	86.388	89.106	1,44
Haurwangi	62.244	64.812	65.998	65.179	68.523	1,56
Ciranjang	86.231	90.163	91.833	89.727	95.408	1,58
Mande	78.037	82.776	84.222	83.111	87.229	1,47
Karangtengah	158.594	167.398	170.927	167.556	178.930	1,86
Cianjur	171.154	174.587	176.368	177.314	178.798	0,7
Cugenang	111.953	118.917	120.961	121.370	125.181	1,44

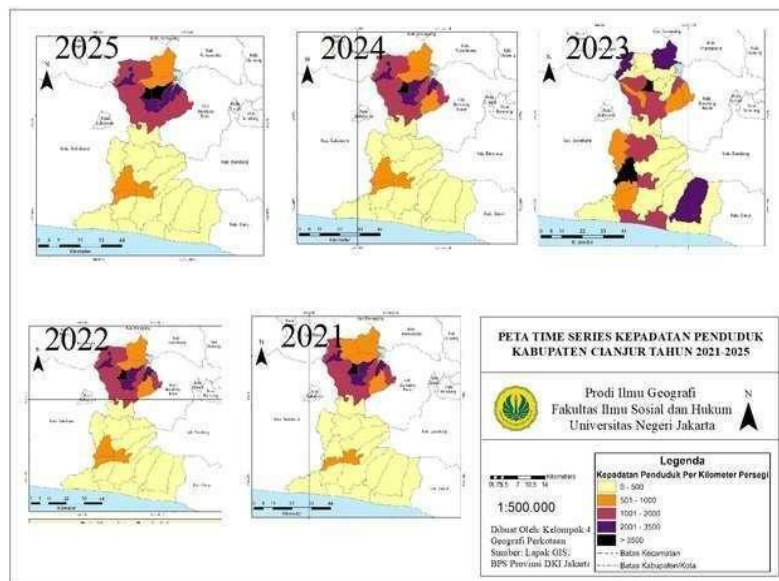
Pacet	106.422	112.320	113.981	113.103	117.124	1,19
Cipanas	109.737	114.430	115.574	115.127	117.086	0,68
Sukaresmi	86.191	92.403	93.720	93.772	96.149	1,13
Cikalongkulon	103.899	109.073	110.646	111.100	113.571	1,15
Kabupaten Cianjur	2.368.613	2.506.682	2.542.793	2.535.002	2.610.316	1,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2025

Tabel 4. Rasio Penduduk Kabupaten Cianjur

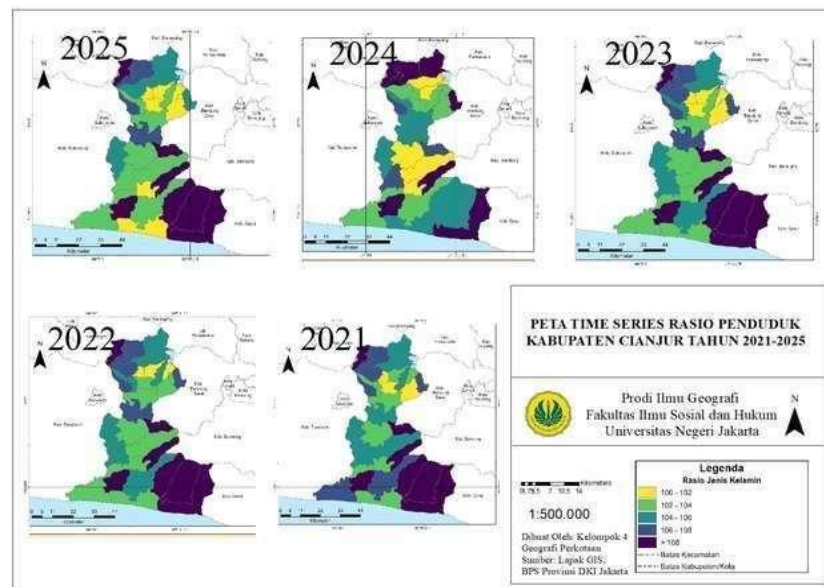
Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
Agrabinta	107,5	104,2	104,06	106	103
Leles	115,3	110,0	110,12	114	110
Sindangbarang	104,4	102,7	102,56	103	101
Cidaun	111,2	110,0	110,43	110	111
Naringgul	113,5	111,2	111,62	115	112
Cibinong	107,8	105,2	104,94	106	104
Cikadu	116,0	112,4	112,98	115	114
Tangeung	103,2	102,9	102,69	103	101
Pasirkuda	113,5	109,6	109,87	115	110
Kadupandak	106,1	104,9	104,85	104	104
Cijati	103,7	102,8	102,87	102	103
Takokak	105,5	105,0	105,18	105	105
Sukanagara	103,7	104,1	104,19	104	104
Pagelaran	105,1	104,4	104,08	104	103
Campaka	106,0	106,6	106,77	106	107
Campakamulya	113,3	112,4	113,11	114	115
Cibeber	104,3	104,2	104,00	103	103
Warungkondang	104,4	104,9	104,83	104	104
Gekbrong	108,1	107,6	107,67	110	107
Cilaku	102,1	102,5	102,18	102	101
Sukaluyu	105,1	104,7	104,31	105	103
Bojongpicung	102,3	102,8	102,49	102	101
Haurwangi	107,3	106,8	106,80	108	106
Ciranjang	102,8	102,2	101,93	102	101
Mande	105,2	105,7	105,78	104	105
Karangtengah	102,5	102,4	102,10	103	101
Cianjur	101,1	101,7	101,54	101	101
Cugenang	106,5	106,9	106,64	107	105
Pacet	106,6	108,0	108,06	106	108
Cipanas	109,6	109,7	109,91	110	110
Sukaresmi	107,0	108,1	108,23	107	108
Cikalongkulon	104,7	105,3	105,25	105	105
Kabupaten Cianjur	105,6	105,4	105,27	105	105

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2025



Gambar 3. Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2025
Sumber: Tim Penulis, 2025

Selama periode 2021–2025, pola kepadatan penduduk Kabupaten Cianjur memperlihatkan konsentrasi yang semakin menguat di wilayah utara, khususnya di kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan pusat kota Cianjur dan jalur utama menuju Bandung. Kecamatan Cianjur sebagai pusat pemerintahan mencatat kepadatan tertinggi. Sementara itu, kecamatan-kecamatan di wilayah selatan, seperti Cidaun dan Naringgul menunjukkan kepadatan yang jauh lebih rendah. Kondisi tersebut mencerminkan adanya perbedaan karakteristik wilayah, baik dari segi kondisi geografis, aksesibilitas, maupun aktivitas ekonomi.



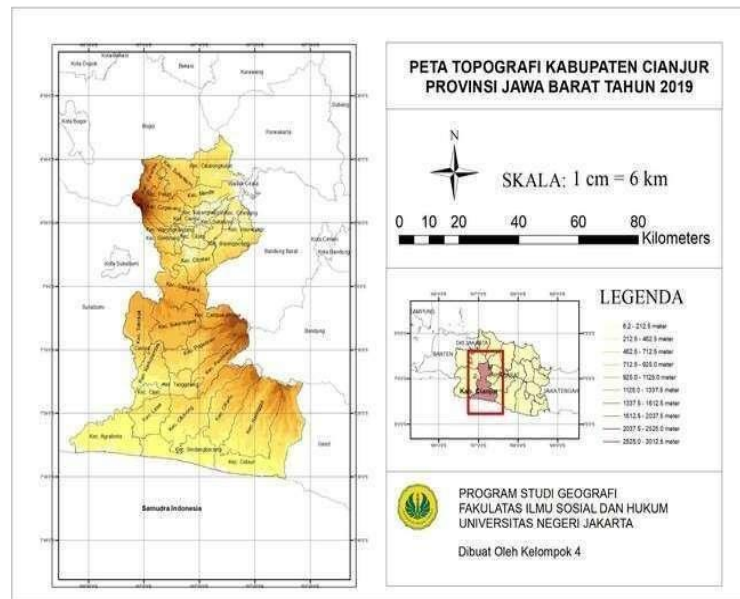
Gambar 4. Peta Jumlah Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2025
Sumber: Tim Penulis, 2025

Peta rasio jenis kelamin menunjukkan bahwa hampir semua kecamatan di Kabupaten Cianjur secara konsisten memiliki rasio di atas 100 yang menandakan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan di hampir seluruh area. Kecamatan-kecamatan yang terletak di bagian tengah hingga selatan cenderung menunjukkan rasio yang lebih tinggi, yaitu di atas 106 bahkan mencapai lebih dari 108. Situasi ini menunjukkan tingginya migrasi perempuan usia produktif ke kota-kota besar untuk bekerja,

sebuah fenomena yang umum terjadi di daerah pedesaan Jawa Barat. Pola ini relatif stabil selama periode 2021 hingga 2025 karena adanya perbedaan kondisi fisik wilayah, tingkat aksesibilitas, dan perkembangan ekonomi antarwilayah.

2. Karakteristik Topografi

Topografi Kabupaten Cianjur memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga kawasan pegunungan dengan ketinggian wilayah antara 6 meter hingga lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut.

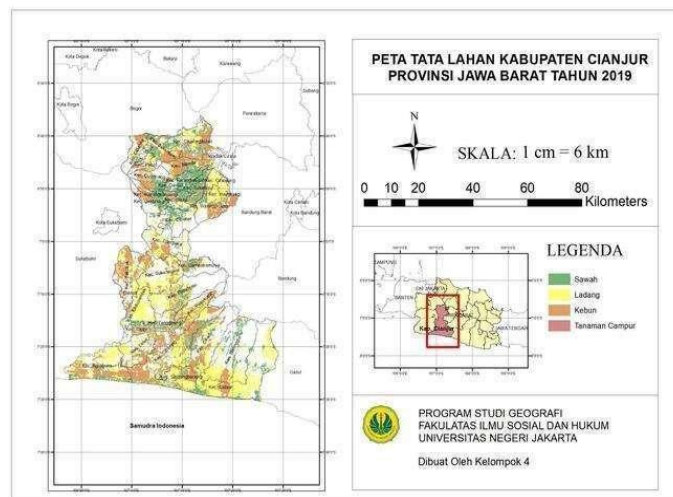


Gambar 5. Peta Topografi Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2019
Sumber: Tim Penulis, 2025

Wilayah utara, seperti Cipanas, Pacet, Sukaresmi, dan Cugenang berada di kawasan kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango dengan kemiringan lereng 0–40% yang dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan teh, dan konservasi hutan sekaligus menjadi sumber mata air bagi sungai-sungai besar. Sementara itu, bagian tengah didominasi perbukitan kecil dan bagian selatan berupa dataran rendah pesisir, seperti Pantai Jayanti dan Pantai Apra yang dimanfaatkan untuk perikanan dan pertanian tanaman pangan. Kondisi topografi tersebut memengaruhi pembangunan infrastruktur, aksesibilitas, serta pola penggunaan lahan di Kabupaten Cianjur yang masih didominasi sektor agrikultur sebesar 63% atau sekitar 229.311,3 hektare, sedangkan kawasan hutan mencapai 26% dan permukiman sekitar 7% yang terus meningkat seiring perkembangan wilayah dan urbanisasi.

3. Karakteristik Morfologi

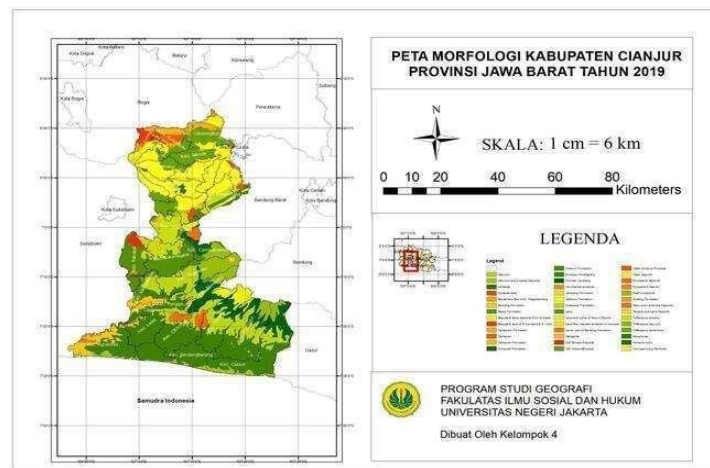
Morfologi Kabupaten Cianjur menunjukkan keragaman bentuk lahan yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, geologis, dan aktivitas tektonik. Wilayah ini didominasi pegunungan dan dataran tinggi di bagian utara serta tengah, sedangkan bagian selatan berupa dataran rendah sempit yang berbatasan dengan Samudera Hindia. Ketinggian wilayah berkisar antara 7 meter hingga 2.962 meter di atas permukaan laut dengan Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebagai titik tertinggi. Kawasan utara, seperti Kecamatan Cipanas, Pacet, Sukaresmi, dan Cugenang memiliki kemiringan lereng 0–40% yang dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan teh, dan kawasan hutan konservasi sekaligus menjadi sumber mata air bagi Sungai Citarum dan Sungai Cibuni. Sementara itu, wilayah selatan dimanfaatkan untuk perikanan dan pertanian tanaman pangan. Kondisi morfologi Cianjur juga dipengaruhi oleh aktivitas tektonik, terutama keberadaan Sesar Cugenang yang menyebabkan wilayah ini rawan gempa bumi serta pola aliran sungai bertipe paralel dari utara ke selatan yang mendukung kebutuhan irigasi dan air masyarakat.



Gambar 6. Peta Tata Guna Lahan Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2019
Sumber: Tim Penulis, 2025

Morfologi Kabupaten Cianjur memberikan berbagai manfaat bagi sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan:

- 1) Pertanian, lahan subur di dataran tinggi digunakan untuk menanam padi pandan wangi, sayuran, dan tanaman hortikultura.
- 2) Perkebunan, perkebunan teh tersebar luas di kawasan Puncak hingga Cipanas.
- 3) Pariwisata, objek wisata alam, seperti Situs Megalitikum Gunung Padang, Gunung Gede-Pangrango, Curug Citambur, serta pantai-pantai selatan menjadi daya tarik wisatawan.
- 4) Konservasi, kawasan hutan lindung di sekitar pegunungan berfungsi sebagai penyangga ekosistem dan mitigasi bencana.



Gambar 7. Peta Morfologi Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2019
Sumber: Tim Penulis, 2025

Ketimpangan Jenis Infrastruktur

Perkembangan wilayah di Kabupaten Cianjur menunjukkan adanya peningkatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik dalam beberapa tahun terakhir yang terlihat dari kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 65,38 pada tahun 2018 menjadi 68,89 pada tahun 2024. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata IPM kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan menempatkan Kabupaten Cianjur pada peringkat terendah dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2024 (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2024). Selain itu, ketimpangan persebaran penduduk turut memengaruhi ketersediaan layanan dasar, seperti jalan, air bersih, pendidikan, dan fasilitas kesehatan sehingga pemerataan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Kabupaten Cianjur masih perlu ditingkatkan.

1. Infrastruktur Jalan dan Transportasi

Infrastruktur jalan memiliki peranan penting dalam mendukung konektivitas wilayah, mobilitas masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi lokal. Ketersediaan jaringan jalan yang memadai dapat memperlancar pergerakan penduduk dan distribusi barang sekaligus meningkatkan aksesibilitas antarwilayah sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat berkembang lebih optimal (Kamaludin & Qibthiyah, 2022).

Tabel 5. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Cianjur

Kondisi Jalan	2022	2023	2024
Baik	660,07	876,83	789,93
Sedang	240,96	112,52	212,27
Rusak	162,18	41,61	53,55
Rusak Berat	271,74	304,26	279,48
Jumlah/Total	1.335,57	1.335,22	1.355,22

Sumber. Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2024

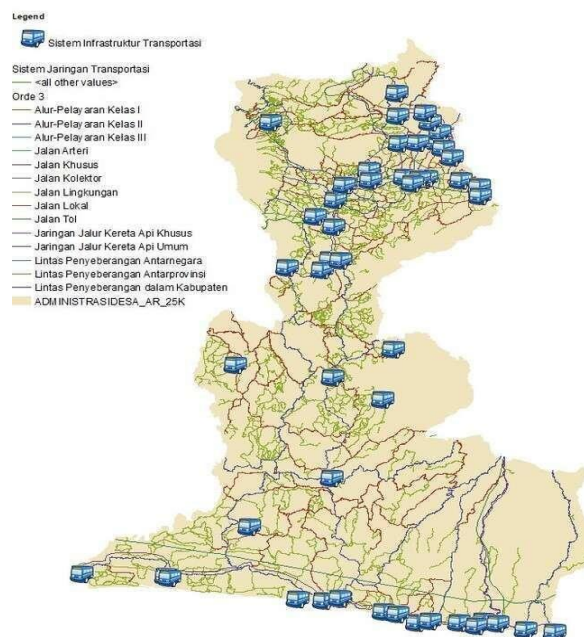
Tabel 6. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Cianjur

Kondisi Jalan	2022	2023	2024
Aspal	654,77	552,72	561,25
Beton	614,64	700,84	708,28
Kerikil atau Tanah	66,16	71,97	57,34
Lainnya		9,70	8,35
Jumlah/Total	1.335,57	1.335,22	1.355,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2024

Berdasarkan Tabel 5 dan Tabel 6, kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Cianjur belum merata. Pada tahun 2024, panjang jalan kabupaten mencapai 1.355,22 km dengan kondisi jalan baik sebesar 789,93 km. Namun, masih terdapat jalan rusak dan rusak berat sepanjang 307,24 km. Selain itu, masih terdapat jalan kerikil atau tanah sepanjang 57,34 km yang umumnya berada di wilayah selatan dengan kondisi geografis lebih sulit sehingga pembangunan infrastruktur jalan masih lebih terkonsentrasi di wilayah utara dan tengah Kabupaten Cianjur.

PETA JARINGAN JALAN DAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI KABUPATEN CIANJUR



Gambar 8. Peta Jaringan Jalan dan Infrastruktur Transportasi di Kabupaten Cianjur

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Tahun 2024

Panjang jalan Kabupaten Cianjur pada tahun 2024 mencapai 1.355,22 km dengan rasio ketersediaan jalan sekitar 0,51 km per 1.000 penduduk. Namun, sekitar 332,76 km atau 24,9% jalan masih berada dalam kondisi rusak dan rusak berat sehingga menghambat mobilitas masyarakat di beberapa wilayah. Jalan beton mendominasi sepanjang 708,28 km meskipun masih terdapat 57,34 km jalan kerikil atau tanah yang umumnya berada di wilayah terpencil. Berdasarkan peta jaringan jalan, wilayah utara dan tengah, seperti Kecamatan Cianjur, Karangtengah, Ciranjang, Cibeber, dan Cipanas memiliki jaringan transportasi yang lebih baik dibandingkan wilayah selatan dan timur seperti Sindangbarang, Agrabinta, Tanggeung, Naringgul, dan Pasirkuda yang masih memiliki keterbatasan akses jalan dan fasilitas transportasi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh topografi wilayah selatan yang berbukit dan pembangunan yang masih terpusat di wilayah utara sehingga ketimpangan aksesibilitas antarwilayah di Kabupaten Cianjur masih cukup terlihat.

2. Infrastruktur Sumber Daya Energi Air dan Listrik

Infrastruktur energi, air, dan listrik merupakan kebutuhan dasar yang mendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan wilayah. Di Kabupaten Cianjur, ketersediaan layanan tersebut masih belum merata, terutama antara wilayah utara yang lebih berkembang dan wilayah selatan yang masih memiliki keterbatasan akses infrastruktur.

a. Fasilitas Sumber Daya Energi Air

Infrastruktur air merupakan bagian penting dalam pembangunan wilayah, terutama untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat, seperti air bersih, irigasi pertanian, dan pengendalian banjir. Ketimpangan dalam distribusi sumber daya air dapat menyebabkan perbedaan kualitas hidup antarwilayah serta memengaruhi produktivitas sektor pertanian dan kesehatan masyarakat.

Tabel 7. Persentase Air Minum Layak di Kabupaten Cianjur

Daerah	Persentase
Cianjur	91,62%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur Tahun 2024

Tabel 8. Jumlah Air yang Disalurkan di Kabupaten Cianjur

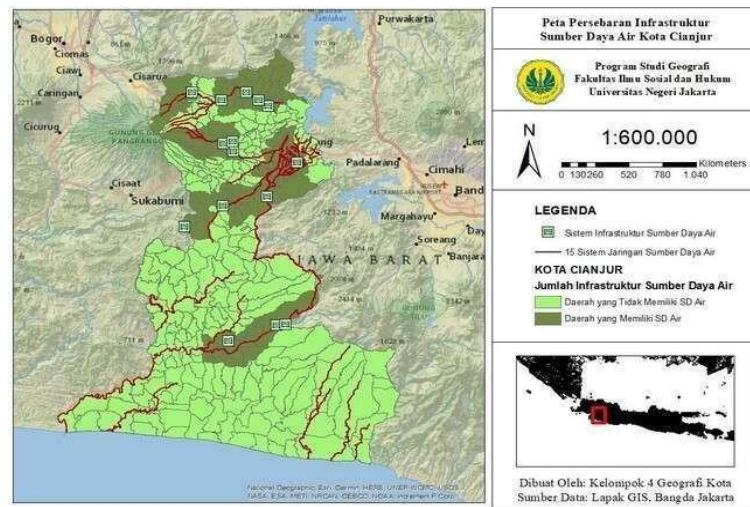
Jenis Pelanggan	Air Disalurkan (m ³)	Nilai Value (Juta Rupiah)
Sosial	90.422	392
Non Niaga	4.740.708	58.991
Niaga dan Industri	319.383	8.654
Khusus	154.290	7.376
	5.304.803	75.413

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 7, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Kabupaten Cianjur tahun 2024 mencapai 91,62%. Angka tersebut menunjukkan sebagian besar masyarakat telah memperoleh layanan air bersih meskipun beberapa wilayah dengan kondisi geografis sulit masih belum terjangkau secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pelayanan air minum di Kabupaten Cianjur masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, berdasarkan Tabel 8, jumlah air yang disalurkan pada tahun 2024 mencapai 5.304.803 m³ dengan nilai distribusi sebesar 75.413 juta rupiah. Penyaluran terbesar berasal dari pelanggan nonniaga sebesar 4.740.706 m³, sedangkan sektor sosial menerima 90.422 m³, sektor niaga dan industri 319,83 m³, serta pelanggan khusus sebesar 154.290 m³. Data tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan air bersih di Kabupaten Cianjur masih didominasi oleh kebutuhan rumah tangga dan pelayanan umum masyarakat.

Peta persebaran infrastruktur sumber daya air menunjukkan jaringan irigasi dan distribusi air di Kabupaten Cianjur belum merata. Infrastruktur air lebih terkonsentrasi di wilayah tengah dan utara, seperti Kecamatan Karangtengah, Ciranjang, dan Cianjur, sedangkan wilayah selatan, seperti Cidaun, Cibinong, Cikadu, dan Tanggeung, masih memiliki keterbatasan akses air bersih akibat kondisi geografis dan rendahnya jangkauan pelayanan. Pertumbuhan penduduk sebesar 1,15% per tahun atau sekitar 30.000 jiwa per tahun turut meningkatkan kebutuhan air bersih, terutama di kecamatan dengan pertumbuhan tinggi, seperti Sukaluyu (2,31%), Karangtengah (1,86%), dan Cilaku (1,78%). Selain itu,

total distribusi air PDAM sebesar 5.304.803 m³ untuk lebih dari 2,6 juta jiwa menunjukkan bahwa layanan air bersih masih belum menjangkau seluruh penduduk secara optimal sehingga sebagian masyarakat masih bergantung pada sumber air nonperpipaan, seperti air sumur.



Gambar 9. Peta Persebaran Fasilitas Sumber Daya Air di Kabupaten Cianjur Tahun 2025
Sumber: Tim Penulis, 2025

b. Fasilitas Sumber Daya Energi Listrik

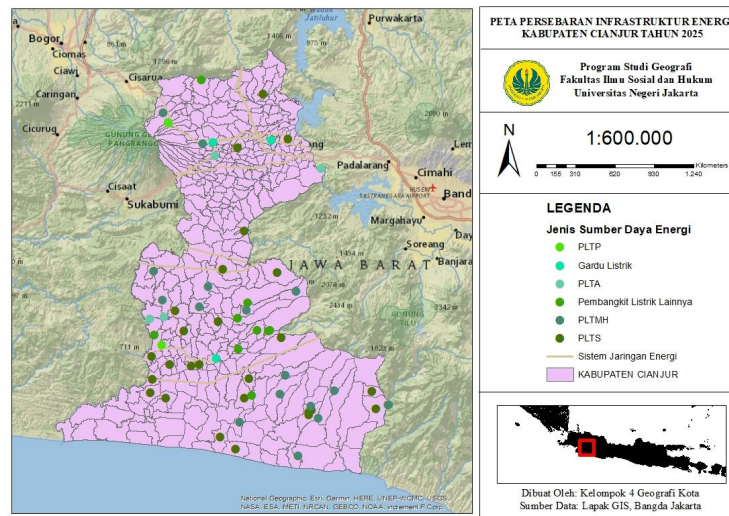
Listrik merupakan kebutuhan penting yang mendukung aktivitas masyarakat dan perkembangan ekonomi wilayah. Ketersediaan infrastruktur listrik juga berperan dalam menunjang kegiatan industri dan aktivitas ekonomi masyarakat (Rosadi & Amar, 2019).

Tabel 9. Jumlah Pemakaian Energi Listrik di Kabupaten Cianjur

Bulan	Pelanggan	Pemakaian
Januari	790.253	94.118,30
Februari	792.226	183.009,27
Maret	794.000	278.303,12
April	795.912	371.849,79
Mei	798.500	472.795,01
Juni	800.901	570.329,84
Juli	803.689	668.375,97
Agustus	808.508	767.642,73
September	813.239	863.990,22
Oktober	816.831	965.947,70
November	819.663	1.063.517,00
Desember	822.723	1.161.980,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur, 2024

Berdasarkan Tabel 9, jumlah pelanggan dan pemakaian listrik di Kabupaten Cianjur tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Jumlah pelanggan meningkat dari 790.253 pelanggan pada awal tahun menjadi 822.723 pelanggan pada bulan Desember, sedangkan pemakaian listrik tertinggi terjadi pada bulan November sebesar 1.653.517,00. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan energi listrik terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi sehingga pemerataan jaringan dan pelayanan listrik masih perlu ditingkatkan.



Gambar 10. Peta Persebaran Jenis Sumber Daya Energi Listrik di Kabupaten Cianjur Tahun 2025
Sumber: Tim Penulis, 2025

Distribusi energi listrik di Kabupaten Cianjur tahun 2025 relatif lebih merata dibandingkan infrastruktur lainnya. Wilayah utara, seperti Cipanas, Pacet, dan Sukaresmi, didukung oleh keberadaan PLTP, PLTA, serta gardu distribusi yang memperkuat pasokan listrik di kawasan padat penduduk. Jumlah pelanggan listrik juga meningkat dari 790.253 pada Januari 2024 menjadi 822.723 pada Desember 2024 dengan rasio sekitar 3,17 orang per pelanggan dari total penduduk 2.610.316 jiwa. Meskipun demikian, kecamatan dengan pertumbuhan penduduk tinggi, seperti Sukaluyu, Karangtengah, dan Cilaku, berpotensi mengalami peningkatan kebutuhan listrik, sementara wilayah selatan, seperti Cikadu, Cidaun, dan Cibinong, masih menghadapi keterbatasan distribusi energi listrik.

3. Infrastruktur Sosial

Ketersediaan infrastruktur sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, turut menjadi penentu kualitas pembangunan wilayah. Layanan yang mudah diakses dan tersebar merata berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya tercermin pada nilai IPM. Sebaliknya, keterbatasan akses terhadap layanan dasar ini justru memperlebar kesenjangan kesejahteraan antarwilayah.

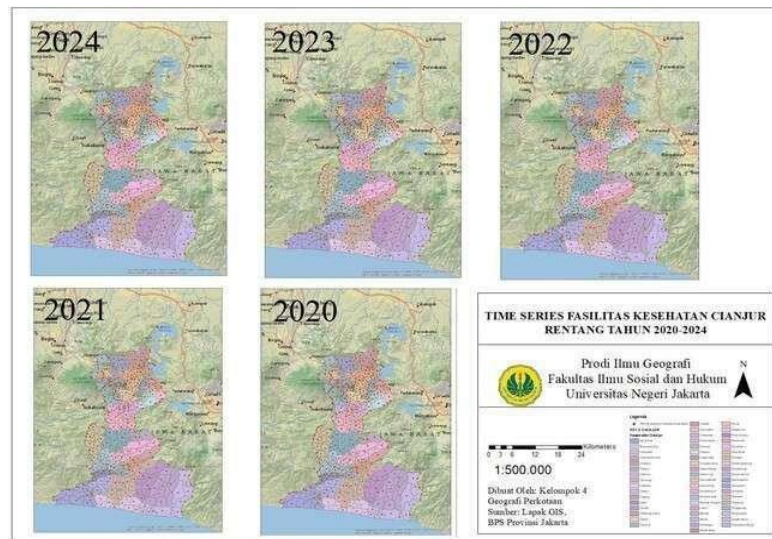
a. Fasilitas Kesehatan

Tabel 10. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Cianjur

Jenis Fasilitas	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Sakit	6	4	5	5	5
Puskesmas	45	47	47	47	47
Klinik	38	49	77	93	Tidak tersedia
Posyandu	Tidak tersedia	2.537	2.929	2.945	3045
Apotek	71	83	88	89	Tidak tersedia

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur, 2024

Berdasarkan Tabel 10, jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Cianjur pada periode 2020–2024 terus mengalami peningkatan. Rumah sakit meningkat dari 4 menjadi 5 unit, puskesmas dari 45 menjadi 47 unit, serta klinik dari 38 menjadi 93 unit pada tahun 2023. Selain itu, posyandu menjadi fasilitas kesehatan terbanyak dengan jumlah mencapai 3.045 unit pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perkembangan pelayanan kesehatan meskipun pemerataan fasilitas kesehatan antarwilayah masih perlu ditingkatkan, terutama di wilayah selatan Kabupaten Cianjur.



Gambar 11. Peta Persebaran Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Cianjur Tahun 2020-2024
Sumber: Tim Penulis, 2025

Berdasarkan peta sebaran fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan di Kabupaten Cianjur masih terkonsentrasi di wilayah utara dan barat, seperti Kecamatan Cianjur, Cilaku, dan Pacet, sedangkan wilayah selatan dan timur, seperti Cibinong, Tanggeung, dan Pasirkuda, memiliki jumlah fasilitas yang lebih sedikit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses layanan kesehatan antarwilayah masih belum merata. Selain itu, jumlah puskesmas yang tetap sebanyak 47 unit sejak tahun 2021 harus melayani lebih dari 2,6 juta jiwa pada tahun 2025 atau sekitar 55.539 jiwa per puskesmas, sementara jumlah rumah sakit juga masih stagnan di angka 5 unit. Tekanan pelayanan kesehatan terlihat lebih tinggi di kecamatan dengan jumlah penduduk besar, seperti Kecamatan Cianjur, Karangtengah, Cilaku, Cibeber, dan Cugenang. Di sisi lain, jumlah posyandu meningkat hingga mencapai 3.045 unit pada tahun 2024 yang menunjukkan adanya penguatan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di tingkat desa dan lingkungan.

b. Fasilitas Pendidikan

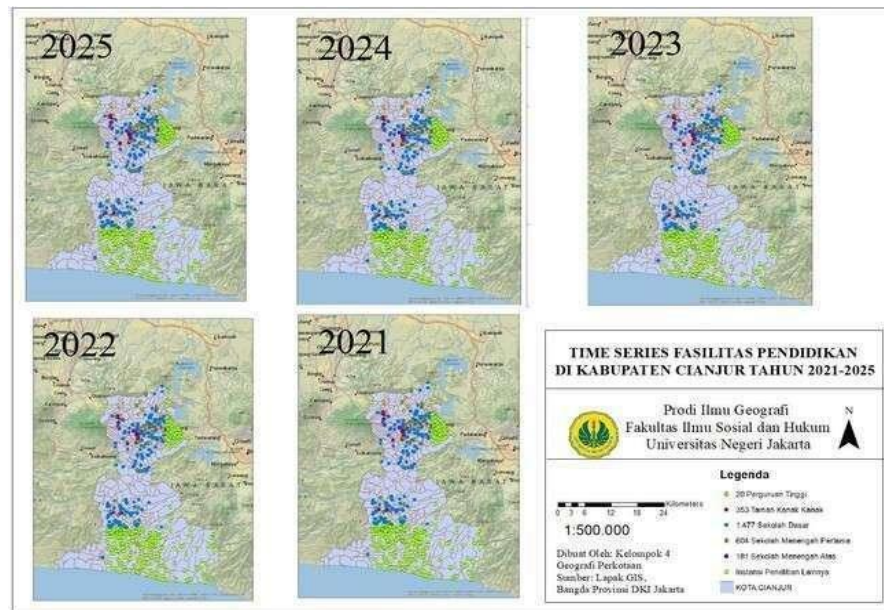
Pendidikan merupakan infrastruktur sosial yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Investasi pendidikan dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, sedangkan kualitas sumber daya manusia yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan perkembangan wilayah (World Bank, 2019; Tarigan, 2019).

Tabel 11. Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Cianjur, 2021-2025

Tahun	Jumlah TK	Jumlah SD	Jumlah MI	Jumlah SMP	Jumlah MTS	Jumlah SMA	Jumlah MA	Jumlah SMK	Jumlah Perguruan Tinggi
2021	231	1.241	231	450	159	94	72	175	14
2022	249	1.246	231	381	160	95	74	185	16
2023	281	1.249	233	392	159	95	73	181	16
2024	317	1.235	233	407	160	96	72	179	15
2025	353	1.244	233	444	160	105	76	187	20

Sumber. Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur

Berdasarkan Tabel 11, jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Cianjur pada periode 2021–2025 cenderung mengalami peningkatan. Jumlah SMP meningkat dari 231 menjadi 233 unit, SMA dari 94 menjadi 105 unit, SMK dari 72 menjadi 76 unit, serta perguruan tinggi dari 14 menjadi 20 unit. Sementara itu, jumlah SD dan MTS relatif stabil selama periode pengamatan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perkembangan fasilitas pendidikan meskipun pemerataan layanan pendidikan antarwilayah masih perlu ditingkatkan, terutama di wilayah dengan aksesibilitas rendah.



Gambar 12. Peta Persebaran Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2025

Sumber: Tim Penulis, 2025

Berdasarkan peta persebaran sekolah, fasilitas pendidikan di Kabupaten Cianjur masih terkonsentrasi di wilayah utara dan tengah, seperti Kecamatan Cianjur, Karangtengah, dan Cipanas, sedangkan wilayah selatan memiliki jumlah sekolah yang lebih sedikit, terutama pada jenjang menengah dan perguruan tinggi. Pada tahun 2025, satu unit SMA melayani sekitar 24.860 jiwa yang menunjukkan tingginya tekanan layanan pendidikan di beberapa wilayah dengan pertumbuhan penduduk tinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, keterbatasan lahan di wilayah perbukitan, serta rendahnya aksesibilitas menuju daerah pegunungan dan perbatasan. Meskipun jumlah TK meningkat dari 231 unit pada tahun 2021 menjadi 353 unit pada tahun 2025 dan perguruan tinggi bertambah dari 14 menjadi 20 unit, perkembangan fasilitas pendidikan masih lebih banyak terkonsentrasi di wilayah utara dan tengah Kabupaten Cianjur.

c. Fasilitas Telekomunikasi

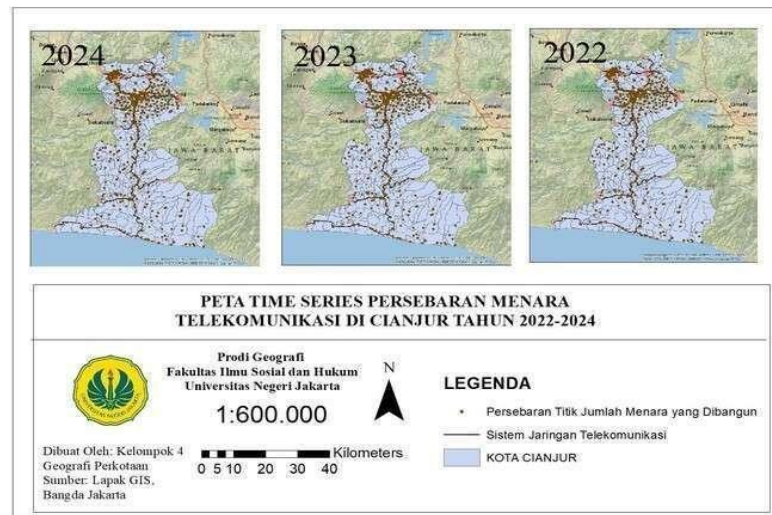
Di era digital yang terus berkembang, infrastruktur telekomunikasi menjadi komponen penting layanan publik, ekonomi digital, dan konektivitas sosial. Wilayah dengan aktivitas perdagangan, jasa, atau pariwisata yang tinggi cenderung lebih cepat memperoleh akses telekomunikasi karena memiliki potensi pasar yang besar. Sebaliknya, daerah pinggiran dengan daya beli rendah sering kali tertinggal dalam pengembangan jaringan.

Tabel 12. Jumlah Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cianjur, 2022-2024

Jumlah Menara yang Dibangun	Tahun
11	2022
14	2023
4	2024

Sumber. Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur

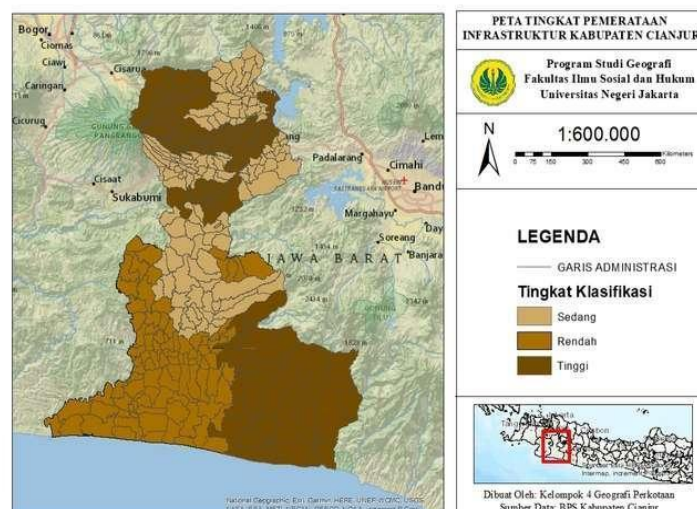
Berdasarkan Tabel 12, pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Cianjur mengalami perubahan yang cukup signifikan selama periode 2022–2024. Jumlah pembangunan menara meningkat dari 11 unit pada tahun 2022 menjadi 14 unit pada tahun 2023. Namun, jumlahnya menurun drastis menjadi 4 unit pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur telekomunikasi masih belum stabil dan berpotensi memengaruhi jangkauan layanan, terutama di wilayah selatan dengan kondisi geografis dan aksesibilitas yang lebih sulit.



Gambar 13. Peta Persebaran Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2024
Sumber: Tim Penulis, 2025

Peta persebaran menara telekomunikasi periode 2022–2024 menunjukkan bahwa infrastruktur telekomunikasi masih terkonsentrasi di wilayah utara dan tengah Kabupaten Cianjur, sedangkan wilayah selatan masih memiliki keterbatasan layanan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kepadatan penduduk yang lebih tinggi di wilayah utara, topografi selatan yang berbukit, serta keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti listrik. Selain itu, pertumbuhan penduduk sebesar 1,15% per tahun hingga mencapai 2.610.316 jiwa pada tahun 2025 belum diimbangi dengan peningkatan infrastruktur telekomunikasi yang memadai. Hal ini terlihat dari penurunan pembangunan menara dari 14 unit pada tahun 2023 menjadi hanya 4 unit pada tahun 2024 sehingga berpotensi meningkatkan gangguan jaringan dan *blank spot*, terutama di wilayah dengan pertumbuhan penduduk tinggi, seperti Sukaluyu dan Karangtengah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai indikator infrastruktur, terlihat bahwa distribusi fasilitas di Kabupaten Cianjur belum merata dan menunjukkan perbedaan yang cukup jelas antarwilayah. Wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang lebih tinggi cenderung berada di kawasan dengan aksesibilitas baik dan aktivitas ekonomi yang lebih berkembang, sementara wilayah dengan keterbatasan akses masih menghadapi tekanan layanan yang lebih besar. Untuk memperjelas pola tersebut secara spasial, hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk peta tingkat pemerataan infrastruktur.



Gambar 14. Peta Tingkat Pemerataan Infrastruktur Kabupaten Cianjur Tahun 2025
Sumber: Tim Penulis, 2025

Berdasarkan peta tersebut, distribusi tingkat pemerataan infrastruktur di Kabupaten Cianjur kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta untuk memperjelas pola ketimpangan antarwilayah. Peta ini menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur tidak tersebar secara merata, melainkan membentuk pola yang cenderung terkonsentrasi pada wilayah utara dan sebagian tengah. Wilayah-wilayah tersebut didominasi oleh kategori tinggi dan sedang, yang ditandai dengan aksesibilitas yang lebih baik, jaringan jalan yang relatif berkembang, serta ketersediaan fasilitas publik yang lebih lengkap. Sebaliknya, wilayah selatan Kabupaten Cianjur terlihat didominasi oleh kategori rendah yang mencerminkan keterbatasan infrastruktur serta akses layanan yang masih minim. Pola ini sejalan dengan kondisi geografis wilayah selatan yang berbukit dan relatif sulit dijangkau sehingga menjadi kendala dalam pembangunan dan distribusi fasilitas. Selain faktor fisik, konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah utara juga turut memperkuat pemusatan pembangunan di kawasan tersebut.

Kondisi infrastruktur dasar, khususnya jalan dan jembatan, masih menjadi isu utama dalam pembangunan daerah. Meskipun tingkat kemantapan jalan telah mencapai sekitar 65%, distribusi kualitas infrastruktur belum merata, terutama pada wilayah pinggiran dan pedesaan. Pemerintah daerah telah menginisiasi berbagai program, seperti pembangunan jalan beton dan peningkatan konektivitas antarwilayah. Namun demikian, keluhan masyarakat terkait aksesibilitas dan kualitas layanan publik masih sering dijumpai. Konsentrasi fasilitas di wilayah utara menunjukkan adanya kecenderungan *centralization effect* yang dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan tingkat aksesibilitas wilayah.

Wilayah dengan aktivitas ekonomi yang lebih berkembang cenderung menjadi pusat pertumbuhan yang mampu menarik investasi serta pembangunan infrastruktur publik. Kondisi ini sejalan dengan konsep *growth pole theory* yang menyatakan bahwa pembangunan tidak berlangsung secara merata, melainkan terkonsentrasi pada wilayah yang memiliki keunggulan lokasi dan jaringan transportasi yang lebih baik. Aksesibilitas yang tinggi mendorong kelancaran mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta peningkatan efisiensi pelayanan publik. Hal ini menyebabkan pemerintah maupun sektor swasta lebih cenderung memusatkan fasilitas pada wilayah tersebut. Sebaliknya, wilayah di luar pusat pertumbuhan berpotensi mengalami keterbatasan akses layanan dan tingkat perkembangan yang lebih rendah. Kondisi ini pada akhirnya memperkuat ketimpangan spasial antarwilayah di Kabupaten Cianjur.

Rekomendasi Strategi Pemerataan Infrastruktur Wilayah

Untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang adil dan merata, Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu menerapkan pendekatan pembangunan yang inklusif dan terintegrasi antarsektor. Ketimpangan infrastruktur, seperti akses jalan yang belum merata, distribusi air bersih yang terbatas, serta keterbatasan fasilitas sosial ekonomi di wilayah selatan dan timur, perlu ditangani melalui strategi berbasis kebutuhan lokal dan potensi wilayah. Adapun beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Prioritas pembangunan wilayah selatan
Pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan transportasi perlu diprioritaskan di wilayah selatan, seperti Cidaun, Tanggeung, dan Naringgul untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.
2. Peningkatan layanan dasar
Pemerintah perlu memperluas akses air bersih, listrik, pendidikan, dan kesehatan, terutama pada wilayah dengan aksesibilitas rendah agar pelayanan dasar dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.
3. Perencanaan berbasis kondisi geografis
Pembangunan infrastruktur perlu mempertimbangkan kondisi topografi dan karakteristik wilayah melalui pendekatan geospasial agar penentuan prioritas pembangunan lebih tepat sasaran.
4. Penguatan koordinasi dan partisipasi masyarakat
Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi antarinstansi serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan agar program yang dijalankan lebih efektif dan berkelanjutan.
5. Optimalisasi penganggaran daerah
Pemanfaatan dana desa dan anggaran daerah perlu diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dasar di wilayah dengan tingkat pembangunan dan aksesibilitas yang masih rendah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis spasial, ketimpangan infrastruktur di Kabupaten Cianjur masih menunjukkan pola yang jelas antara wilayah utara dan selatan. Wilayah utara dan sebagian tengah memiliki tingkat ketersediaan infrastruktur yang lebih baik, ditandai oleh kepadatan jaringan jalan, konsentrasi fasilitas pelayanan, serta aksesibilitas yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Sebaliknya, wilayah selatan masih menghadapi keterbatasan konektivitas akibat kondisi topografi yang lebih sulit dan distribusi pembangunan yang belum merata. Kondisi tersebut terlihat dari panjang jalan kabupaten sebesar 1.335,22 km, di mana sekitar 332,76 km atau 24,9% berada dalam kondisi rusak dan rusak berat. Dengan jumlah penduduk mencapai 2.610.316 jiwa pada tahun 2025, rasio ketersediaan jalan hanya sekitar 0,51 km per 1.000 penduduk. Ketimpangan juga terlihat pada infrastruktur telekomunikasi, di mana pembangunan menara menurun dari 14 unit pada tahun 2023 menjadi 4 unit pada tahun 2024 sehingga berpotensi memperluas area *blank spot* di beberapa wilayah.

Perbedaan tingkat pemerataan infrastruktur dipengaruhi oleh kondisi topografi, konsentrasi aktivitas ekonomi, jumlah penduduk, serta arah pembangunan yang masih terpusat di wilayah tertentu. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa perkembangan permukiman dan lahan terbangun di Kabupaten Cianjur lebih terkonsentrasi pada wilayah utara dan tengah. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan perlu diarahkan pada penguatan konektivitas wilayah selatan melalui perbaikan kualitas jalan, perluasan jaringan transportasi dan telekomunikasi, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, listrik, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, perencanaan pembangunan berbasis data spasial diperlukan agar pembangunan antarwilayah dapat berlangsung lebih merata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuty, Y. I., Mardalena, A., & Wibowo, A. (2023). Analisis perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Spatial Wahana Komunikasi Dan Informasi Geografi*, 23(1), 48–59. <https://doi.org/10.21009/spatial.231.01>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur. (2024). *Kabupaten Cianjur dalam angka 2024*. <https://cianjurkab.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur. (2025). *Kabupaten Cianjur dalam angka 2025*. <https://cianjurkab.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2024). *Indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Barat 2024*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- Herath, H. M. A. (2017). Regional development and regional disparities in Sri Lanka. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 7(8), 1–6.
- Indrianeu, T., Fadjarajani, S., & Singkawijaya, E. B. (2021). Analisis potensi pariwisata di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Geografi Geografi dan Pengajarannya*, 19(1), 73–90. <https://doi.org/10.26740/jggp.v19n1.p73-90>
- Kamaludin, A. S., & Qibthiyah, R. M. (2022). Village road quality and accessibility on transforming rural development. *Agraris*, 8(2), 160–180. <https://doi.org/10.18196/agraris.v8i2.13618>
- Nurwati, N., & Mulyana, N. (2017). Profil penduduk Kabupaten Cianjur. *Share: Social Work Journal*, 7(2), 46–57. <https://doi.org/10.24198/share.v7i2.15721>
- Panjaitan, A., Sudarsono, B., & Bashit, N. (2019). Analisis kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Kabupaten Cianjur menggunakan sistem informasi geografis. *Jurnal Geodesi Undip*, 8(1), 248–257. <https://doi.org/10.14710/jgundip.2019.22578>
- Prahasta, E. (2021). *Sistem informasi geografis: Konsep-konsep dasar perspektif geodesi dan geomatika*. Informatika.
- Rosadi, M., & Amar, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi listrik di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(2), 273–286. <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i2.6170>
- Sjafrizal. (2018). *Analisis ekonomi regional dan penerapannya di Indonesia*. Depok, Indonesia: Rajawali Pers.
- Tarigan, R. (2019). *Perencanaan pembangunan wilayah* (Edisi revisi). Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara.
- UN-Habitat. (2022). *World cities report 2022: Envisaging the future of cities*. Nairobi, Kenya: United Nations Human Settlements Programme.
- World Bank. (2019). *World development report 2019: The changing nature of work*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1328-3>
- World Economic Forum. (2018). *The inclusive development index 2018*. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/reports/the-inclusive-development-index-2018/>